



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 100.3 / 319 / 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Salatiga Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan usulan Rancangan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/271/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Salatiga Tahun 2025, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

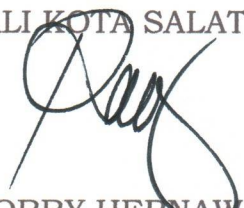
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Salatiga Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 100.3/271/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA SALATIGA, *y*



RF ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 100.3 / 319 / 2025
TANGGAL : 18 September 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2025

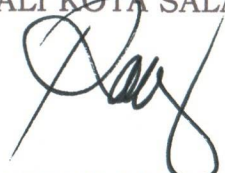
No.	JUDUL	PEMRAKARSA
1.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	BPKPD
2.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
3.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	
4.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame	
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	
6.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	
7.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	
8.	Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026	
9.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	
10.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
11.	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
12.	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
13.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	
14.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
15.	Bagan Akun Standar	

No.	JUDUL	PEMRAKARSA
16.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
17.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
18.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026	
19.	Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	Bappeda
20.	Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	
21.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	
22.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	
23.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	
24.	Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	
25.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	
26.	Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	
27.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	
28.	Insentif dan Disinsentif Persetujuan Penataan Ruang	
29.	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	
30.	Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja	
31.	Insentif dan Disinsentif Persetujuan Bangunan Gedung	
32.	Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD
33.	Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	
34.	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	
35.	Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	
36.	Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	
37.	Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	

No.	JUDUL	PEMRAKARSA
38.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	
39.	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Kesehatan
40.	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	
41.	Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Klinik Paru Masyarakat	
42.	Sistem Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Klinik Paru Masyarakat	
43.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> Kota Salatiga Tahun 2025-2030	
44.	Tarif Pelayanan Non Medik pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Paru Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Kantor Dinas Kesehatan Kota Salatiga	
45.	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	Inspektorat Daerah
46.	Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah	
47.	Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis	Dinpersip
48.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	DP3AP2KB
49.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045	
50.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPMPSTP
51.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Disperinaker
52.	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diskominfo
53.	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum Setda
54.	Pencabutan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar Akademik, serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	BKPSDM
55.	Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	Bagian Organisasi Setda
56.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	

No.	JUDUL	PEMRAKARSA
57.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan	
58.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan	
59.	Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	
60.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	
61.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	
62.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman	DPKP
63.	Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi, UKM
64.	Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Bagian PBJ Setda
65.	Pedoman Pemberian Insentif Modin dan Pengurus Tempat Ibadah	Bagian Kesra Setda
66.	Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pendidikan	Dinas Pendidikan
67.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	DLH

WALI KOTA SALATIGA, 1


 ROBBY HERNAWAN